

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

UNTUK PEMERATAAN EKONOMI

proyek infrastruktur
245

proyek strategis nasional (PSN)

ditetapkan KPPIP

37

proyek infrastruktur prioritas

Implementasi

Berdasarkan Perpres No 58/2017 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) 37 dari 245 PSN sebagai infrastruktur prioritas

MASALAH

ANGGARAN
terbatas

terkendala
pembebasan
LAHAN

Koordinasi

berjalan cukup baik. KPPIP selalu berkoordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek dalam hal penyediaan fasilitas maupun mengatasi permasalahan di lapangan.

Dampak

terrealisasinya sebagian PSN dan infrastruktur prioritas terhadap pemerataan ekonomi sejauh ini **tidak terlalu signifikan**, walaupun memiliki andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara, *focus group discussion*, dan observasi. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *non probability sampling*.

UNIT ANALISIS:

1. Bappeda
2. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
3. PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Bitung.
4. PT. Jasamarga Manado Bitung.
5. PT. Utama Karya (Persero).
6. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
7. Akademisi.
8. LSM.
9. Masyarakat.

Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan ekonomi.